



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAHARDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN
3. NHK : 672109

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.326.150.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 2241 m2 di KAB / KOTA POSO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 620 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 46.500.000
4. Tanah Seluas 1463 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 109.725.000
5. Tanah Seluas 547 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 41.025.000
6. Tanah Seluas 1034 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000
7. Tanah Seluas 1572 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 117.900.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1250 m2/684 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 698 m2/374 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
10. Tanah Seluas 1941 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 159.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 345.000.000**



1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
207.000.000		
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
135.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	744.415.244
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.450.565.244
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.450.565.244

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.